



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84B Tahun 2020 tentang Kode Klasifikasi Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84b Tahun 2020 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
9. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan.
10. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
11. Kode Klasifikasi Arsip adalah kode sebagai identitas penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat dalam klasifikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Kode Klasifikasi arsip dimaksudkan untuk :

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pedoman kepada aparatur di unit pengolah dan unit kearsipan dalam :
 1. melakukan pemberkasan arsip dinamis berdasarkan subjek;
 2. menjamin informasi arsip dari kegiatan yang sama kegiatan dan/atau masalahnya akan mengelompok ke dalam satu berkas;
 3. mengatur penyimpanan arsip secara logis sistematis dan konsisten;
 4. mendukung secara langsung penyusutan arsip;
 5. pengendalian dan membantu dalam mempercepat penemuan kembali arsip.

(2) Kode Klasifikasi arsip bertujuan untuk :

- a. sinkronisasi informasi kearsipan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. menyelenggarakan pengelolaan arsip dari tahapan penciptaan sampai penyusutan berjalan selaras dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu; dan
- d. mendukung terwujudnya tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KODE KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan merupakan bagian dari tata kearsipan Pemerintah Kota Pekalongan
- (2) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (4) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah.
- (5) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (6) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (7) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 84B Tahun 2020 tentang Pola Klasifikasi Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 84B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84b Tahun 2020 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 3 Januari 2023

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada Tanggal 3 Januari 2022
Plh. SEKRETARIS DAERAH

ANITA HERU KUSUMORINI
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

000 UMUM

- 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
 - 000.1.1 Telekomunikasi
 - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
 - 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
 - 000.1.6 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 000.1.7 Penyediaan Konsumsi
 - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
 - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
 - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
 - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.1 Pertamanan/Landscape
 - 000.1.8.2 Penghijauan
 - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
 - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
 - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
 - 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
 - 000.1.9.1 Perbaikan/Pemeliharaan
 - 000.1.9.2 Pemasangan
 - 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
 - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
 - 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
- 000.2 PERLENGKAPAN
 - 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2		Pemeliharaan peralatan kantor
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.1		Inventarisasi dan Penyimpanan
	000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2		Pemeliharaan peralatan kantor
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3		Distribusi
	000.2.3.1	Barang habis pakai
	000.2.3.2	Barang milik daerah
000.2.4		Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk di dalamnya proses lelang penghapusan
000.2.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000.3		PENGADAAN
	000.3.1	Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
	000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
	000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
	000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
	000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base penggunaan system informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
	000.3.6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi
000.4		PERPUSTAKAAN
	000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusah Rekaman
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3		Koleksi Pustaka

	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6		Layanan Perpustakaan
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7		Kerjasama Perpustakaan
	000.4.7.3	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.1	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program Aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10		Konservasi
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12		Transformasi Digital
000.4.13		Kurasi Digital
000.4.14		Pengembangan Perpustakaan
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5		KEARSIPAN
000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.5.2		Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Bimbingan Konsultasi Kearsipan

	000.5.2.6	Data Base Arsiparis
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga / Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga / Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga / Unit Kearsipan Teladan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan ArsipAktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	
000.5.6	Penyusutan Arsip	
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

- 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
- 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
 - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
 - 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
 - 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
 - 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
 - 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media))
 - 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
 - 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
 - 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
- 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
- 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
 - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 000.5.15.3 Sanksi

- 000.6 PERSANDIAN
 - 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.6.2 Pengamanan persandian
 - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
 - 000.6.2.2 Materiil sandi: sistem dan peralatan
 - 000.6.2.3 Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
 - 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 000.6.3.3 Pelaksanaan
 - 000.6.3.4 Pelaporan
 - 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
 - 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.6.5.1 Pelaporan
 - 000.6.5.2 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.6.5.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.6.5.5 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.6.5.6 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.6.5.7 Pelaksanaan Verifikasi
- 000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 - 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
 - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
 - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
 - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
 - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
 - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
 - 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
 - 000.7.2.7 Penetapan/Kontrak Kinerja
 - 000.7.2.8 Laporan Berkala
 - 000.7.2.9 Laporan Insidental
 - 000.7.2.10 Evaluasi Program
 - 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
 - 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
 - 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
 - 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
 - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah

	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000.7.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000.8.1		Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
000.8.2		Uraian Jabatan
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
	000.8.2.3	Evaluasi Jabatan
000.8.3		Ketatalaksanaan
	000.8.3.1	Proses Bisnis
	000.8.3.2	Standar Pelayanan
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
	000.8.3.4	Pelayanan Publik
000.8.4		Standar Kompetensi jabatan structural dan fungsional
000.8.5		Evaluasi Kelembagaan
000.8.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
	000.8.6.1	Budaya Kerja
	000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
	000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
000.9		PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
000.9.1		Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
000.9.2		Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/ pengkajian/rekomendasi
000.9.3		Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
000.9.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000.9.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	000.9.6.1	Data
	000.9.6.2	Statistik
	000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7		Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8		Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
000.9.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10		Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasita sKepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah i stimewa
- 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
 - 100.1.6.1 LKPJ/LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
 - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
 - 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
 - 100.2.2.5 Fasilitasi PelayananU mum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
 - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
 - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
 - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
 - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3	HUKUM
100.3.1	Program Legislasi
100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi/Surat Edaran
100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah
100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis
100.3.7	Kesepakatan / Memorandum of Understanding (MOU) / Kontrak / Perjanjian kerjasama
100.3.7.1	Dalam Negeri
100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian bantuan /konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100.3.11	Kasus/Sengketa Hukum
100.3.11.1	Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
100.3.11.3	Tata Usaha Negara
100.3.11.4	PerburuhaN
100.3.11.5	Arbitrase
100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan
100.3.13	HakatasKekayaanIntelektual (HAKI)
100.3.13.1	Hak Cipta
100.3.13.2	Hak Paten
100.3.13.3	Hak Desain Industri
100.3.13.4	HakRahasia Dagang
100.3.13.5	Hak Merk

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Fasilitas dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.1 Fasilitas dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitas Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitas dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitas dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitas Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 200.1.4.6 Fasilitas
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas: Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitas Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitas Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
 - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
 - 200.1.5.2 Fasilitas Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 200.1.5.3 Fasilitas Kelembagaan Partai Politik
 - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
 - 200.1.5.7 Database Parpol
 - 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
 - 200.1.5.9 Pemilihan Umum
- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
 - 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
 - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
 - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
 - 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2	PEMILU
200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
300.1.2.1	Tata Operasional Polisi Pamong Praja
300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4	Perlindungan Masyarakat
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia
300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN
300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempatlatihan
300.2.2.6	Registrasi BEACON
300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5	Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3	Pemasyarakatan dan SertifikasiPencarian dan Pertolongan
300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8	Operasi Komunikasi
300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3	Registrasi BEACON
300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi
300.2.12.1	Laporan Harian
300.2.12.2	Laporan Bulanan

		300.2.12.3	Laporoan Tahunan
		300.2.12.4	Evaluasi
300.3	PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	300.3.1	Kebijakan di bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	300.3.2	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		300.3.2.1	Rencana, pengolahan data, pengkajian dan pemetaan kerawanan kebakaran
		300.3.2.2	Pembinaan dan pengawasan aparatur dan peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan
		300.3.2.3	Pemberdayaan msyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan penanggulangan kebakaran
	300.3.3	Operasi Pemadaman dan penyelamatan	
		300.3.3.1	Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan
		300.3.3.2	Operasi pemadaman, pengendalian kebakaran, dan bahaya akibat kebakaran
		300.3.3.3	Operasi penyelamatan manusia non kebakaran
	300.3.4	Inventarisasi dan Pemeliharaan	
	300.3.5	Pengembangan Sistem Informasi	
	300.3.6	Penyajian dan Layanan Informasi	
	300.3.7	Pelaporan dan Evaluasi	
		300.3.7.1	Laporan Harian
		300.3.7.2	Laporan Bulanan
		300.3.7.3	Laporoan Tahunan
		300.3.7.4	Evaluasi
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL		
	400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.1.2	Pembangunan Sumber Daya	
		400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
		400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energy dan lingkungan hidup
		400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
		400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
		400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
		400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
		400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
		400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur

	400.1.3.5	Fasilitasi energy dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desatertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
400.1.5	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antarDesa
	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	400.2.1	Kebijakan di bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1	Data gender

	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
400.2.3		Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.3.7	Partisipasi public untuk kesejahteraan ibu
400.2.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	400.2.4.2	Data perlindungan anak
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
	400.2.4.5	Partisipasi public untuk kesejahteraan anak
400.2.5		Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3		PENDIDIKAN
400.3.1		Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	Block Grant
400.3.3		Pendidikan Masyarakat
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4		Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5		Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama

	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba, Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.2	Sertifikasi Guru
	400.3.10.3	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.5	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.6	Block grant
	400.3.10.7	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.10.8	Uji Kompetensi Guru
400.3.11	Penilaian Pendidikan	

	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4		KEOLAHRAGAAN
400.4.1		Kebijakan di bidangKeolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.4.2		Pengelolaan Olahraga Pendidikan
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi
	400.4.3.1	Olahraga Massal
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga
	400.4.9.1	IndustriOlahraga
	400.4.9.2	PromosiOlahraga
400.4.10		Olahraga Prestasi
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga

- 400.5 KEPEMUDAAN
 - 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
 - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
 - 400.5.2.3 Pengembangan
 - 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
 - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
 - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
 - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
 - 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
 - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
 - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
 - 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
 - 400.5.5.1 Pengkajian
 - 400.5.5.2 Pengembangan
 - 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
 - 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
 - 400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
 - 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan, Pengembangan kepedulian, pendampingan
 - 400.5.7 Kewirausahaan
 - 400.5.7.1 Kelembagaan
 - 400.5.7.2 Pengaderan
 - 400.5.7.3 Perintisan
 - 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
 - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
 - 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber daya
 - 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumber daya
 - 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.9.1 Standardisasi
 - 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 400.5.10.1 Kemitraan
 - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
- 400.6 KEBUDAYAAN
 - 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
 - 400.6.2.2 Pelindungan
 - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
 - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional

400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1	Sejarah
400.6.4.2	Pemetaan nilai
400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
400.6.5.2	Kekayaan budaya
400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7	KESEHATAN
400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfuse darah
400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
400.7.2.9	Pembiayaan darah
400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
400.7.2.11	Unit transfuse darah, bank darah rumah sakit dan ejaring pelayanan darah
400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terencil, sangat terencil dan kepulauan
400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)

	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4		Keperawatan dan keteknisian Medik
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasaran alat kesehatan
400.7.6		Kesehatan Jiwa
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8		Pengendalian penyakit menular langsung
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9		Pengendalian penyakit bersumber binatang
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif

	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11		Penyehatan lingkungan
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasidasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higiensanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12		Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
400.7.13		Gizi
	400.7.13.1	Gizimakro
	400.7.13.2	Gizimikro
	400.7.13.3	Giziklinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14		Kesehatan ibu
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15		Kesehatan anak
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16		Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternative dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17		Kesehatan kerja dan Olah raga
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18		Obat Publik dan perbekalan kesehatan
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19		Produksi dan distribusi alat kesehatan
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostic in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20		Kefarmasian
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian

	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obatrasional
400.7.21		Produksi dan distribusi kefarmasian
	400.7.21.1	Obattradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, precursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirianobat dan bahanbakuobat
400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengen dalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25		Intelegensia Kesehatan
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26		Kesehatan Haji
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan
400.7.27		Promosi Kesehatan
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan
	400.7.27.4	Hari Kesehatan
400.7.28		Data dan Informasi
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan system informasi dan bank data kesehatan
400.7.29		Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30		Pengawasan

		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
		400.7.30.2	Standarisasi produk pangan
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
		400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
		400.7.30.5	Pengawasan
	400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN		
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.8.2	Fasilitasi	
		400.8.2.1	Data
		400.8.2.2	Pelaksanaan
		400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
		400.8.2.4	Kasus Keagamaan
		400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
		400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
		400.8.3.2	Pembinaan
		400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
		400.8.3.4	Pengetahuan
		400.8.3.5	Lingkungan
400.9	SOSIAL		
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
		400.9.2.1	Kesejahteraan Sosial anak balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan Sosial anak terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan Sosial anak berhadapan dengan hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan Sosial anak dengan kecatatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan Sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
		400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan runguwicara, mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
		400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
		400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
		400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
		400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
		400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
	400.9.6	Pelayanan Sosial lanjut usia	
		400.9.6.1	Pelayanan Sosial dalam dan luar panti
		400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
		400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan Sosial kedaruratan
	400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	

400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1	Ketahanan Sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasisosial
400.9.9.3	Pemulihan Sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasisosial
400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasisosial
400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial
400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan Sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
400.9.12.1	Ketahanan keluarga
400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat dan organisasisosial
400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
400.9.14.3	Penataan Sosial lingkungan kumuh
400.9.14.4	Advokasi Sosial dan pengembangan aksesibilitas
400.9.14.5	Bantuan Langsung
400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial

- 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
 - 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
 - 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan SimpanPinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
 - 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat
 - 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
 - 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan
 - 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
 - 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
 - 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
 - 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
 - 400.11.2.2 Taman Kota
 - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
 - 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
 - 400.11.3.2 Pemakaman
 - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
 - 400.11.4 Jalur Hijau
 - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
 - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

- 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan
- 400.12 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 - 400.12.1 Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
 - 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
- 400.13 KELUARGA BERENCANA
 - 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
 - 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
 - 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk

- 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
 - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
 - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin Perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

- 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
 - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga non pemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah
 - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
 - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
 - 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 - 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 - 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
 - 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
 - 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor/pejabat
 - 400.14.3 Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multimedia
 - 400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping koran
 - 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster/plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
 - 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
 - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
 - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
 - 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
 - 400.14.7 Bahan / materi pidato / siding Muspida Provinsi / Kota / Kabupaten
 - 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
 - 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
 - 400.14.10 Pameran/sayembara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
 - 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
 - 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

- 500.1 KETAHANAN PANGAN
 - 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
 - 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

	500.1.2.1	Ketersediaan Pangan
	500.1.2.2	Akses Pangan
	500.1.2.3	Kerawanan Pangan
500.1.3		Distribusi dan Cadangan Pangan
	500.1.3.1	Distribusi Pangan
	500.1.3.2	Harga Pangan
	500.1.3.3	Cadangan Pangan
500.1.4		Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
	500.1.4.1	Konsumsi Pangan
	500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan
	500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar
500.1.5		Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
	500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan
	500.1.5.2	Penghargaan Ketahanan Pangan
500.1.6		Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7		Bimbingan Teknis
500.1.8		Evaluasi
500.2		PERDAGANGAN
500.2.1		Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.2.2		Perdagangan Dalam Negeri
	500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
	500.2.2.2	Bina Usaha Jasa Perdagangan
	500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
	500.2.2.4	Informasi Perusahaan
	500.2.2.5	Pelaku Pasar
	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan

	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5	Bimbingan Teknis	
500.2.6	Evaluasi	
500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi
	500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi	
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenaga listrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan	
	500.3.4.1	Program Pendanaan
	500.3.4.2	Pengembangan
	500.3.4.3	Urusan Permodalan
	500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
	500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
	500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha	
	500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
	500.3.5.2	Ekspor dan Impor
	500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
	500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
	500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
	500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1	Penelitian Koperasi
500.3.8.2	Penelitian UKM
500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1	PeraturanPerundang-Undangan
500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi
500.4	KEHUTANAN
500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.5.2	Perikanan Tangkap
500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
500.5.2.14	Kenelayanan
500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan

500.5.3	Perikanan Budidaya
500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
500.5.4.2	Pengembangan Produk
500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500.5.4.4	Industri Pengolahan
500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500.5.4.8	Pengembangan Industri
500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
500.5.4.18	Pengembangan Impor
500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.20	Pelayanan Usaha
500.5.4.21	Kemitraan Usaha
500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I

	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6		Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7		Karantina Ikan
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengkuan

	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN	
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.6.2	Perlindungan hortikultura
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pasca panen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida

- 500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- 500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
 - 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
 - 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
 - 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.9.4 Kelembagaan Benih
- 500.6.10 Budidaya Serealia
 - 500.6.10.1 PadiIrigasi dan Rawa
 - 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
 - 500.6.10.3 Jagung
 - 500.6.10.4 Serealia Lain
- 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.11.1 Kedelai
 - 500.6.11.2 Ubi Kayu
 - 500.6.11.3 Aneka Kacang
 - 500.6.11.4 Aneka Umbi
- 500.6.12 Tanaman Pangan
 - 500.6.12.1 Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
 - 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
- 500.6.13 Pasca panen Tanaman Pangan
 - 500.6.13.1 Padi
 - 500.6.13.2 Jagung dan Serealia Lain
 - 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
 - 500.6.13.4 Aneka Umbi
- 500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
 - 500.6.14.1 Tanaman Pangan
 - 500.6.14.2 Holtikultura
 - 500.6.14.3 Perkebunan
 - 500.6.14.4 Peternakan
- 500.6.15 Mutu dan Standarasi
 - 500.6.15.1 Standardisasi
 - 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
 - 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
 - 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
- 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
 - 500.6.16.2 Investasi
 - 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
 - 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
 - 500.6.17.1 Informasi Pasar
 - 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga

	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20		Diseminasi
500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Loka karya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26		Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa
	500.6.26.4	Hak Merek
	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28		Pelayanan Hukum
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29		Karantina Pertanian
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30		Bimbingan Teknis
500.6.31		Evaluasi
500.7		PETERNAKAN
500.7.1		Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2		Peternakan dan Kesehatan Hewan
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit

		ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pasca panen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
	500.7.3	Bimbingan Teknis
	500.7.4	Evaluasi
500.8	PERKEBUNAN	
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.8.2	Tanaman Semusim
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6		Pascapanen dan Pembinaan Usaha
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7		Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8		Evaluasi Perkebunan
500.9		PERINDUSTRIAN
500.9.1		Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2		Iklim Usaha dan Kerja Sama
	500.9.2.1	Industri Manufaktur
	500.9.2.2	Industri Agro
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3		Promosi Industri
	500.9.3.1	Industri Manufaktur
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4		Standarisasi dan Teknologi
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5		Hak dan Kekayaan Intelektual
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6		Industri Hijau
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7		Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
500.9.9		Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500.9.11		Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500.9.12		Standarisasi
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13		Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
	500.9.13.1	Kebijakan Industri

	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14		Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	LingkunganHidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15		Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16		Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
500.10		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.11		PERHUBUNGAN
	500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
	500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder
	500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan
	500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan
	500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
	500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
	500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor
	500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
	500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antarkota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.21	Tarif dan Keperintisan	

- 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tariff angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
 - 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
- 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
 - 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan

- 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
- 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
 - 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
- 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
 - 500.11.29.1 Promosi Keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antral embaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
 - 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
 - 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
- 500.11.31 Audit Keselamatan
 - 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
 - 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.31.3 Audit factor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
 - 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
 - 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.33 Parkir
 - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
 - 500.11.33.2 Izin tempat khusus parker swasta
 - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.12.2 Telekomunikasi
 - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
 - 500.12.3 Penyiaran
 - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
 - 500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika
500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Government
500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Government
500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e- Government
500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business
500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e- Business
500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e- Business
500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat
500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika
500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi
500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik
500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi
500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
500.12.12.2	Informasi Perekonomian

- 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
 - 500.12.13.1 Media Cetak
 - 500.12.13.2 Media Online
 - 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
 - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi
- 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
 - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
 - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
 - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
 - 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
 - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
 - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
 - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
 - 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
 - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
 - 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
 - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
 - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitas
 - 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataaan
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataaan dan EkonomiKreatif
500.14	STATISTIK	
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
	500.14.2.1	Perencanaan
	500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Uji coba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
	500.14.3	Survei
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan / pengiriman, pengelompokkan / Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing / Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi

	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
500.15	KETENAGAKERJAAN	
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas

	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11		Standardisasi Profesi
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12		Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13		Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14		Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15		Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16		Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17		Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

- 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
- 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
- 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
- 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 - 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
 - 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
 - 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
 - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K3
 - 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3
 - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
 - 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.16 PENANAMAN MODAL
 - 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
 - 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah

- 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
- 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
- 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
- 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
- 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
- 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas
- 500.17 PERTANAHAN
 - 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
 - 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
 - 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
 - 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian
- 500.18 TRANSMIGRASI
 - 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi

	500.18.2.1	Fasilitas Pengadaan Tanah
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitas Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

- 600.1 PEKERJAAN UMUM
 - 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
 - 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
 - 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
 - 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
 - 600.1.6 Bencana lokal yang ditangani oleh Nasional (Contoh seperti kasus lumpur Sidoarjo)
 - 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
 - 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
 - 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
 - 600.1.8 Pembangunan Jalan
 - 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
 - 600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
 - 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
 - 600.1.9 Preservasi Jalan
 - 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
 - 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
 - 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
 - 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.10.3 Teknik Jembatan
 - 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
 - 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah

	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12		Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi
600.2		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan

	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2	Analisa Teknik
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6		Penyediaan Rumah Susun
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9		Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi

	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis
600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi
600.3		TATA RUANG (TATA KOTA)
	600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
	600.3.2	Perencanaan
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kota

600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian
600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4	Pemetaan
600.3.4.1	Peta Dasar
600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP
600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan
600.4.5	Dampak Lingkungan
600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
600.4.5.2	Penerapan system kebijakan Dampak Lingkungan
600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.6.3	AgroIndustri dan Usaha Skala Kecil
600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.7.3	AgroIndustri dan Usaha Skala Kecil
600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.8.1	Pengembangan
600.4.8.2	Pemanfaatan
600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600.4.8.4	Keamanan Hayati
600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
600.4.10.1	Perangkat mitigasi
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon

	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14		PengelolaanLimbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15		Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan Pemenang Adipura
600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18		Penegakan Hukum Pidana Lingkungan
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19		Komunikasi Lingkungan
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	KearifanLingkungan
600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan

- 600.4.23.1 Pengelolaan Data
- 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
- 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
- 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
 - 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
 - 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
 - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan
 - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
 - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

- 700.1 PENGAWASAN INTERNAL
 - 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
 - 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
 - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
 - 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak PidanaKorupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
 - 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
 - 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
 - 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
 - 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
 - 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
 - 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

- 800.1 SUMBER DAYA MANUSIA
 - 800.1.1 Penyusunan dan PenetapanKebutuhanAparaturSipil Negara
 - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
Antara lain: Bahan penyusunan rencana

		kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasiantar Perwakilan, Mutasike dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan TugasBelajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawaiswasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	

	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13		Administrasi Perseorangan
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14		Penilaian Kompetensi
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
	800.2.2.4	Modul-modul diklat
	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3		Widyaiswara
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4		Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Diklat

	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5	Alumni
900 KEUANGAN		
900.1	KEUANGAN DAERAH	
900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	
900.1.3.2	Pendapatan	
900.1.3.3	Belanja	
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	
900.1.3.7	Daftar Gaji	
900.1.3.8	Kartu Gaji	
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	
900.1.3.10	Laporan Keuangan	
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	
900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	

900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),
900.1.4.10	Staff Appraisal Report
900.1.4.11	Report /Laporan
900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/HibahLuar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l.: Copy FakturPajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
900.1.7.3	Buku Rekening Bank
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran (DPP), Daftar

	Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan / Pedoman / Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemiludari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemiludari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemiludari APBD
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah
900.1.12.1	Anggaran Daerah
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah

- 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
- 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
- 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
- 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
- 900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan
 - 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

- 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
- 900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
- 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
- 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
- 900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - 900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data

dan informasi untuk penyusunan laporan
pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan
daerah, Pengelolaan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap
Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

P1h. SEKRETARIS DAERAH

ANITA HERU KUSUMORINI